

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang penelitian- penelitian terdahulu yang terkait dengan penggunaan relasi kekuasaan dan juga membahas kajian pustaka sebagai landasan teori dan kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

2.1 Relasi Kuasa

2.1.1 Konsep Dasar Relasi Kuasa

Relasi kekuasaan merupakan konsep sentral dalam kajian sosial yang terus mengalami perkembangan, terutama dalam ranah analisis wacana kritis. Salah satu tokoh utama yang memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman hubungan antara bahasa dan kekuasaan adalah Teun A. van Dijk. Dalam perspektifnya, relasi kekuasaan dipahami sebagai hubungan asimetris antara kelompok sosial, di mana kelompok dominan memiliki kapasitas untuk mengontrol tindakan, pemikiran, bahkan kepercayaan kelompok lain (van Dijk, 2008). Kontrol ini tidak semata-mata diwujudkan melalui tindakan fisik atau koersif, tetapi justru lebih sering hadir dalam bentuk yang tersembunyi dan sistematis melalui penggunaan bahasa dan wacana dalam ruang publik. Van Dijk (2008) mendefinisikan kekuasaan sebagai bentuk kontrol, yaitu ketika satu pihak (A) mampu mengendalikan tindakan dan/atau pikiran pihak lain (B). Dengan kata lain, kekuasaan dalam pandangan ini lebih bersifat simbolik dan kognitif, yang berlangsung melalui proses representasi sosial dalam wacana sehari-hari (van Dijk, 2005).

Salah satu aspek penting dalam analisis van Dijk adalah kontrol atas produksi dan akses terhadap wacana. Kontrol ini mencakup penguasaan terhadap topik yang layak dibahas, gaya bahasa yang digunakan, serta siapa yang memiliki hak untuk berbicara dan didengar dalam ruang sosial (van Dijk, 1993). Penguasaan atas dimensi-dimensi tersebut memungkinkan kelompok dominan mempertahankan ideologi mereka sekaligus membungkai realitas sosial sesuai dengan kepentingan tertentu (van Dijk, 1998). Dalam konteks ini, van Dijk (2006) menekankan bahwa bentuk kekuasaan yang paling efektif adalah yang mampu

mengendalikan pikiran masyarakat, yaitu ketika wacana yang diproduksi secara berulang membentuk persepsi publik dan membingkai pandangan dunia secara halus. Hal ini menyebabkan masyarakat tanpa sadar menginternalisasi ideologi dominan sebagai sesuatu yang wajar, netral, bahkan alamiah. Peran media massa menjadi sangat strategis dalam proses ini, karena ia berfungsi sebagai saluran utama penyebaran wacana yang sarat dengan kepentingan ideologis dan politik tertentu (van Dijk, 1995).

Lebih jauh lagi, relasi kekuasaan dalam konteks pendidikan menjadi arena penting dalam reproduksi ideologi dominan. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen ideologis di mana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan melalui wacana (van Dijk, 2001). Pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam sistem pendidikan seperti negara, lembaga pendidikan, guru, atau dosen—memiliki kuasa untuk menentukan wacana apa yang sah untuk diajarkan, kurikulum seperti apa yang digunakan, dan nilai-nilai apa yang dianggap penting untuk ditanamkan. Hal ini tampak nyata dalam kontrol terhadap struktur dan isi wacana pendidikan, seperti buku pelajaran, silabus, materi evaluasi, hingga narasi yang digunakan dalam praktik pembelajaran di ruang kelas (van Dijk, 2008). Dengan mengontrol wacana tersebut, pihak berkuasa secara tidak langsung juga mengontrol cara berpikir peserta didik dan membentuk representasi sosial mereka.

Van Dijk (2006) menyoroti bahwa bentuk kekuasaan yang paling halus dan efektif adalah kekuasaan yang bersifat kognitif, yaitu ketika peserta didik menyerap ideologi tertentu melalui bahasa dan narasi yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tampak netral. Narasi-narasi tersebut sejatinya memuat kepentingan politik dan ideologis kelompok dominan. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi ruang hegemoni, yaitu kondisi di mana individu atau kelompok yang didominasi justru menerima dan mereproduksi kekuasaan secara sukarela karena pikirannya telah dibentuk oleh wacana dominan (van Dijk, 2003). Hegemoni ini bekerja melalui proses internalisasi ideologi yang tersembunyi di balik struktur wacana pendidikan dan distribusi pengetahuan. Ketimpangan akses terhadap sumber daya

simbolik seperti informasi, jabatan, dan otoritas akademik semakin memperkuat dominasi kelompok elit dalam menentukan wacana yang dianggap sah dan legitim (van Dijk, 1998).

Untuk mengkaji dinamika relasi kekuasaan tersebut, van Dijk (2009) mengembangkan pendekatan multidimensional dalam analisis wacana kritis yang melibatkan tiga tingkatan utama: struktur teks, struktur kognitif, dan struktur sosial. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, ideologi merupakan elemen penting yang tersembunyi di balik pilihan bahasa dan struktur naratif yang digunakan dalam wacana (van Dijk, 1998). Melalui kontrol atas wacana dan penyebaran ideologi, kelompok dominan tidak hanya mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga membatasi munculnya resistensi dari kelompok subordinat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep relasi kekuasaan menurut van Dijk menjadi sangat penting dalam analisis wacana kritis, terutama untuk mengungkap bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat kekuasaan yang sering kali tidak kasatmata, namun sangat efektif dalam membentuk struktur sosial dan kesadaran kolektif masyarakat.

Sementara itu, Foucault (1977) menawarkan paradigma baru dalam memahami kekuasaan yang berbeda dari pendekatan tradisional. Menurutnya, kekuasaan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga produktif. Ia menyatakan bahwa kekuasaan tersebar dalam berbagai institusi dan hubungan sosial, serta berkaitan erat dengan produksi pengetahuan yang secara aktif membentuk subjek dan norma dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan entitas yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, melainkan dimanifestasikan melalui praktik sosial yang terus berlangsung dalam relasi strategis yang dinamis. Artinya, kekuasaan hadir di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja—termasuk oleh mereka yang secara sosial dianggap tidak berkuasa selama mereka terlibat dalam hubungan sosial (Foucault, 1977).

Foucault (1978) menekankan bahwa kekuasaan tidak beroperasi dari satu pusat tertentu, melainkan bersirkulasi melalui berbagai institusi sosial seperti sekolah, rumah sakit, pabrik, dan penjara. Institusi-institusi ini menjalankan kekuasaan melalui serangkaian strategi disipliner yang menghasilkan keteraturan sosial, seperti pengawasan, ujian, pengaturan ruang, dan hukuman. Dalam konteks pendidikan, kekuasaan diwujudkan melalui mekanisme pengendalian pengetahuan, penilaian, dan internalisasi norma-norma tertentu yang dianggap sah. Strategi ini membentuk individu bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang bertindak berdasarkan pengetahuan yang telah mereka internalisasi (Foucault, 1978).

Salah satu bentuk kekuasaan yang dikembangkan Foucault adalah kekuasaan disipliner, yakni mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui pengetahuan. Kekuasaan ini tidak beroperasi secara koersif, melainkan melalui kontrol internal yang terinternalisasi dalam tubuh individu. Pengetahuan yang diakses dan diterima seseorang akan membentuk cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menghasilkan normalisasi, yaitu kebiasaan tubuh dan pikiran untuk bertindak sesuai dengan struktur kekuasaan yang berlaku.

Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan tidak terpisah dari pengetahuan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan merupakan dua sisi yang saling memperkuat. Kekuasaan menggunakan pengetahuan untuk melegitimasi dirinya, sementara pengetahuan dibentuk dan dikonstruksi oleh relasi kekuasaan. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa materi ajar, metode pembelajaran, dan evaluasi bukanlah hal yang netral, melainkan sarat dengan nilai dan ideologi tertentu. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam pendidikan bukanlah subjek bebas sepenuhnya, melainkan hasil dari praktik kekuasaan yang membentuknya (Foucault, 1977).

Lebih lanjut, Foucault (1980) juga menyoroti dimensi resistensi sebagai bagian integral dari relasi kekuasaan. Ia menolak pandangan bahwa kekuasaan bersifat absolut dan satu arah. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan kekuasaan tanpa perlawanan. Resistensi bisa terjadi secara langsung

maupun tersembunyi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam sistem kekuasaan yang ada (Foucault, 1980).

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Scott (1985) tentang *everyday resistance*, yaitu bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak selalu konfrontatif, namun efektif dalam menegosiasikan kekuasaan (Scott, 1985). Demikian pula, De Certeau (1984) membedakan antara strategi—yang digunakan oleh institusi kekuasaan dan taktik yang digunakan oleh individu untuk menyiasati sistem (De Certeau, 1984). Dalam hal ini, individu diposisikan bukan hanya sebagai objek kekuasaan, tetapi juga sebagai agen yang dapat merespons, menolak, dan bahkan menciptakan kekuasaan baru melalui praktik sosialnya.

Dalam diskursus pendidikan, pemikiran Paulo Freire (1970) memperkaya analisis Foucault dengan menyoroti hubungan kuasa antara guru dan murid. Freire mengkritik model pendidikan tradisional yang disebutnya sebagai “banking model”, di mana guru menjadi pusat otoritas dan siswa hanya diposisikan sebagai wadah pasif penerima pengetahuan. Model ini mereproduksi relasi kuasa yang hierarkis dan menindas, serta menghambat perkembangan kesadaran kritis peserta didik. Sebaliknya, Freire menawarkan model pendidikan yang membebaskan, yaitu proses dialogis di mana guru dan murid saling belajar dan membentuk makna secara kolektif. Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak hanya milik guru, tetapi dapat dinegosiasikan dalam ruang belajar melalui partisipasi aktif dan kesadaran kritis siswa. Relasi kekuasaan menjadi lebih setara, dan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pembebasan, bukan dominasi (Freire, 1970).

Michel Foucault (1977) menawarkan paradigma baru dalam memahami kekuasaan yang berbeda dari pendekatan tradisional. Menurutnya, kekuasaan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga produktif. Ia menyatakan bahwa kekuasaan tersebar dalam berbagai institusi dan hubungan sosial, serta berkaitan erat dengan produksi pengetahuan yang secara aktif membentuk subjek dan norma dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan entitas yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, melainkan dimanifestasikan melalui praktik

sosial yang terus berlangsung dalam relasi strategis yang dinamis. Artinya, kekuasaan hadir di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja—termasuk oleh mereka yang secara sosial dianggap tidak berkuasa—selama mereka terlibat dalam hubungan sosial.

Steven Lukes (2005) memperluas pemahaman ini dengan mengidentifikasi tiga dimensi kekuasaan, yakni kekuasaan yang tampak dalam pengambilan keputusan, kekuasaan yang mengendalikan agenda, dan kekuasaan yang membentuk kesadaran serta preferensi individu secara tersirat. John Gaventa (2006) menambahkan perspektif dinamis kekuasaan sebagai relasi antara berbagai aktor, dengan bentuk-bentuk seperti *power over*, *power to*, *power with*, dan *power within* yang relevan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, Nancy Fraser (2013) mengajukan teori redistribution-recognition, yang melihat relasi kuasa sebagai hasil dari ketidakadilan ekonomi (maldistribution) dan ketidaksetaraan kultural (misrecognition), terutama dalam sistem sosial yang bersifat eksklusif. Sementara itu, Allen (2016) mengusulkan pendekatan *power as relational capacity*, yang menekankan bahwa kuasa adalah kapasitas yang terbentuk secara relasional, dan dapat bersifat menindas, memberdayakan, atau keduanya tergantung pada konteks. Teori-teori terkini juga melihat bagaimana teknologi digital turut membentuk relasi kuasa baru melalui pengawasan, algoritma, dan infrastruktur platform (Couldry & Mejias, 2019). Oleh karena itu, pemahaman relasi kuasa dewasa ini menuntut pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek diskursif, material, dan digital dalam membaca ketimpangan dan potensi resistansi.

Pierre Bourdieu (1991) memperkenalkan konsep kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang beroperasi melalui bahasa, budaya, dan norma sosial yang diterima secara sukarela, sehingga menciptakan legitimasi tanpa paksaan eksplisit. Dalam era digital dan globalisasi, Manuel Castells (2009) menyoroti kekuasaan jaringan yang bekerja melalui struktur sosial, ekonomi, dan politik yang terdesentralisasi dan berbasis hubungan. Selain itu, kajian kritis dan postkolonial, seperti yang dikemukakan oleh Fraser (2009) dan Spivak (1988), melihat kekuasaan dari

perspektif resistensi dan emansipasi, di mana subjek tidak hanya menjadi objek dominasi tetapi juga agen aktif dalam merebut kembali kekuasaan. Dengan demikian, berbagai teori ini menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis relasi kekuasaan dalam masyarakat kontemporer, yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini.

2.1.2 Relasi Kuasa Dalam Komunikasi

Relasi kuasa merupakan aspek fundamental dalam setiap proses komunikasi. Dalam berbagai bentuk interaksi, baik secara interpersonal, institusional, maupun dalam ranah media, relasi kuasa tercermin dalam siapa yang berbicara, siapa yang didengarkan, serta bagaimana makna dibentuk dan dipertahankan. Kuasa tidak hanya hadir dalam bentuk otoritas formal, tetapi juga melekat pada akses terhadap informasi, penguasaan simbol, serta kemampuan mengendalikan wacana (Fairclough, 1995). Oleh karena itu, komunikasi dapat dipahami sebagai arena tempat kekuasaan dinegosiasikan, dipertahankan, atau bahkan dilawan.

Konsep kekuasaan dalam komunikasi secara mendalam dibahas oleh Michel Foucault, yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar dalam seluruh jaringan sosial dan tidak hanya beroperasi melalui mekanisme represif. Menurut Foucault (1978), kekuasaan bekerja melalui diskursus yakni sistem aturan yang mengatur apa yang dapat dikatakan, siapa yang berhak berbicara, dan bagaimana makna dibentuk. Diskursus tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi juga memproduksi realitas itu sendiri melalui apa yang disebut sebagai *regimes of truth*, yaitu tatanan kebenaran yang ditentukan oleh struktur kekuasaan dominan.

Jürgen Habermas menyoroti pentingnya komunikasi sebagai medium untuk mencapai konsensus dalam masyarakat demokratis. Dalam *Theory of Communicative Action*, ia membedakan antara komunikasi yang ditujukan untuk saling pengertian dengan komunikasi yang terdistorsi oleh kepentingan strategis. Habermas (1984) menyebut bahwa komunikasi yang ideal harus berlangsung dalam situasi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara,

mengemukakan pendapat, dan mempertanyakan klaim tanpa adanya dominasi. Namun, dalam praktiknya, komunikasi kerap kali terdistorsi oleh kekuatan sistem seperti ekonomi dan politik yang menghambat terciptanya komunikasi yang rasional.

Pendapat penting lainnya datang dari pemikiran Antonio Gramsci, yang memperkenalkan konsep hegemoni sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat ideologis. Menurut Gramsci (1971), kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui pembentukan konsensus budaya yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dalam konteks komunikasi, media berperan sebagai agen utama dalam menyebarkan nilai-nilai dominan, sehingga menjadikannya tampak sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dipertanyakan.

Relasi kuasa dapat teridentifikasi dalam berbagai ranah komunikasi. Dalam media massa, misalnya, praktik penentuan agenda dan pembingkai informasi mencerminkan relasi antara pemilik media, pemerintah, dan khalayak (McCombs & Shaw, 1972). Dalam organisasi, relasi kuasa terlihat dari komunikasi hierarkis yang lebih mengutamakan instruksi top-down dan sering mengabaikan partisipasi karyawan (Mumby, 1988). Dalam politik, retorika digunakan sebagai sarana untuk membentuk opini publik dan mempertahankan dominasi ideologis. Sementara itu, dalam komunikasi antarbudaya, sering kali terjadi pemaksaan nilai dan norma budaya dominan atas kelompok minoritas, yang menciptakan bentuk imperialisme simbolik (Said, 1978).

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, telah menghadirkan perubahan signifikan dalam dinamika relasi kuasa komunikasi. Platform digital menciptakan ruang baru di mana kekuasaan tidak lagi sepenuhnya terpusat, melainkan tersebar ke berbagai aktor yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap saluran komunikasi publik. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang bagi masyarakat sipil dan individu untuk menyuarakan opini, menantang narasi dominan, dan membentuk komunitas berbasis isu. Di sisi lain, kuasa tetap beroperasi dalam bentuk algoritma, moderasi konten, dan pengawasan digital yang dilakukan oleh korporasi teknologi maupun negara (Couldry & Mejias, 2019).

Dalam konteks ini, kuasa hadir tidak hanya melalui isi pesan, tetapi juga melalui infrastruktur komunikasi yakni siapa yang mengendalikan platform, bagaimana informasi disebar, serta siapa yang mendapatkan visibilitas atau malah dibungkam. Maka, diskursus digital juga menjadi arena kontestasi antara kebebasan berekspresi dan praktik pengendalian informasi.

Pemahaman terhadap relasi kuasa dalam komunikasi menjadi sangat penting dalam kerangka analisis kritis terhadap berbagai praktik komunikasi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui bahasa dan simbol, serta bagaimana wacana dominan dikonstruksi dan dipertahankan. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi praktik resistensi dan upaya-upaya untuk membangun komunikasi yang lebih setara dan adil. Dengan demikian, teori relasi kuasa tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar normatif untuk perubahan sosial.

2.1.3 Relasi Kuasa Dalam Konteks Pendidikan

Dalam realitas sosial, pendidikan merupakan institusi yang tidak netral. Ia banyak mengandung unsur kekuasaan yang membentuk serta menentukan proses belajar-mengajar. Relasi kuasa dalam pendidikan mencerminkan hubungan-hubungan dominasi yang memengaruhi siapa yang memiliki hak untuk mengatur pengetahuan, menetapkan standar pembelajaran, menentukan konten kurikulum, serta mengarahkan perilaku siswa sesuai norma tertentu. Kekuasaan ini bisa datang dari otoritas lembaga, kebijakan negara, guru, atau bahkan nilai-nilai ideologis yang bekerja di balik sistem pendidikan formal.

Freire (1970) mengkritik sistem pendidikan konvensional yang memperlakukan siswa sebagai wadah pasif yang harus diisi oleh guru. Model ini, yang ia sebut sebagai pendidikan gaya bank, menciptakan relasi kuasa satu arah, di mana pendidik menjadi pusat otoritas penuh atas pengetahuan. Situasi ini cenderung menekan kemampuan berpikir kritis siswa serta menghalangi terjadinya proses pembelajaran yang dialogis dan emansipatif. Freire mengusulkan model pendidikan yang partisipatif, di mana guru dan siswa belajar bersama dalam proses

dialogis. Pendekatan ini berupaya menciptakan ruang pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial dan memberdayakan peserta didik untuk terlibat aktif dalam perubahan masyarakat. Menurut Freire, pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan.

Dalam kerangka pemikiran Gramsci (1971), pendidikan menjadi bagian dari aparatus ideologis yang berfungsi mempertahankan dominasi kelas penguasa. Melalui struktur kurikulum dan narasi-narasi yang diajarkan di sekolah, nilai-nilai budaya dan politik kelompok dominan disosialisasikan dan dilegitimasi. Meski demikian, Gramsci menekankan bahwa institusi pendidikan juga memiliki potensi untuk menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis dan transformasi sosial.

Foucault (1977) memandang bahwa institusi seperti sekolah memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku individu melalui teknik-teknik pengawasan, pengujian, serta pelabelan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya ditunjukkan secara langsung oleh otoritas guru, melainkan juga dijalankan melalui sistem nilai, tata tertib, dan mekanisme evaluasi. Kekuasaan bekerja melalui kebiasaan dan aturan yang membuat peserta didik menyesuaikan diri terhadap norma yang dianggap sah.

Dalam praktik sehari-hari, kekuasaan di lingkungan pendidikan muncul dalam berbagai bentuk. Relasi antara guru dan murid sering kali mencerminkan dominasi satu arah, yang membatasi ruang bagi siswa untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Pemilihan materi pelajaran dan metode evaluasi biasanya didasarkan pada perspektif dominan yang belum tentu mencerminkan keragaman latar belakang siswa. Selain itu, disiplin sekolah yang kaku serta penggunaan bahasa formal yang tidak inklusif dapat menciptakan hambatan komunikasi dan memperkuat hierarki sosial di dalam kelas.

Meskipun pendidikan kerap mencerminkan ketimpangan kekuasaan, ia juga memiliki potensi sebagai arena untuk perubahan sosial. Praktik pendidikan kritis mendorong terjadinya dialog terbuka, pembongkaran ideologi dominan, serta pembentukan pemahaman yang lebih adil dan reflektif terhadap realitas sosial. Dengan pendekatan yang berbasis kesetaraan, pendidikan dapat menjadi alat bagi

kelompok marjinal untuk menuntut hak, memperkuat identitas, dan mendorong perubahan sistemik.

Apple (2019) mengkritisi kurikulum sebagai alat ideologis yang mencerminkan kepentingan kelas dominan dan mendorong pentingnya pedagogi kritis sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Fraser (2013) menambahkan dimensi keadilan sosial dalam pendidikan melalui teori *redistribution-recognition*, yang menekankan pentingnya pengakuan identitas serta redistribusi sumber daya.

Di era digital, relasi kuasa dalam pendidikan tidak lagi terlepas dari pengaruh teknologi. Williamson (2020, 2022) menunjukkan bagaimana platform digital, algoritma pembelajaran, dan kebijakan data menciptakan bentuk kekuasaan baru yang bersifat tersembunyi namun sangat menentukan praktik pembelajaran. Hal ini selaras dengan analisis Selwyn dan Jandrić (2020), yang melihat pendidikan sebagai ruang yang dipenuhi relasi kuasa post-digital, di mana data, performativitas, dan kontrol melebur dalam praktik belajar daring. Dalam pendekatan dekolonial, Andreotti (2021) mengingatkan bahwa sistem pendidikan masih mereproduksi relasi kuasa kolonial melalui epistemologi dominan, kurikulum barat-sentris, dan bahasa hegemonik, sehingga mendesak hadirnya pendidikan yang reflektif terhadap keberagaman epistemik. Oleh karena itu, pemahaman relasi kuasa dalam pendidikan masa kini memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan struktur sosial, teknologi digital, dan kritik terhadap warisan colonial untuk mendorong terciptanya pendidikan yang adil, demokratis, dan transformatif.

2.1.4 Relasi Kuasa Dalam Kelas

Kelas tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran, melainkan juga sebagai ruang sosial di mana hubungan kekuasaan terjadi secara aktif. Dalam ruang ini, kekuasaan hadir melalui berbagai bentuk, mulai dari struktur peran antara guru dan siswa, regulasi institusional, pola komunikasi, hingga praktik penilaian. Hubungan antara guru sebagai pihak yang memiliki otoritas, dan siswa sebagai penerima pembelajaran, menciptakan konfigurasi kuasa yang berdampak

langsung pada bagaimana peserta didik berperilaku, berpikir, dan berpartisipasi dalam proses belajar.

Relasi kekuasaan tidak hanya muncul dalam hubungan vertikal antara guru dan siswa, tetapi juga di antara siswa itu sendiri. Selain itu, norma-norma yang diterapkan oleh lembaga pendidikan turut membentuk batasan partisipasi, ekspresi, serta identitas individu di dalam kelas. Oleh karena itu, ruang kelas merepresentasikan struktur sosial yang lebih luas dalam skala mikro.

Melalui lensa interseksionalitas, yang diperkenalkan oleh Crenshaw (1991), relasi kuasa dalam ruang kelas juga dapat dilihat melalui keterkaitan antara identitas sosial seperti jenis kelamin, etnisitas, kelas ekonomi, dan latar budaya. Tidak semua siswa memiliki pengalaman belajar yang sama; sebagian kelompok, seperti perempuan atau siswa dari komunitas minoritas, mungkin menghadapi diskriminasi yang tidak selalu disadari. Ketimpangan ini bisa muncul melalui bias bahasa, materi ajar, atau ketimpangan akses dalam berbicara dan berpartisipasi. Kesadaran terhadap keragaman latar belakang ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan setara.

Berbagai bentuk hubungan kekuasaan dalam kelas dapat dikenali dari praktik sehari-hari. Dosen sering kali memegang kendali penuh atas jalannya diskusi, arah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar, yang dapat membatasi ruang dialog serta kreativitas siswa. Sistem evaluasi, seperti ujian dan peringkat, juga berkontribusi dalam mengklasifikasikan siswa secara hierarkis. Selain itu, aturan disiplin dan budaya komunikasi yang kaku dapat memperkuat jarak antara peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik sendiri.

Meskipun kelas dapat menjadi tempat reproduksi dominasi, ia juga menyimpan potensi sebagai ruang resistensi dan pembebasan. Ketika pengajaran dilakukan secara reflektif, partisipatif, dan menghargai perbedaan, ruang kelas dapat berfungsi sebagai arena transformatif. Dalam pendekatan pedagogi kritis, guru tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya sumber otoritas, tetapi menjadi fasilitator yang mendorong pertukaran ide dan pembentukan makna secara kolektif. Melalui interaksi yang lebih setara dan terbuka, kelas dapat berkontribusi pada

terciptanya kesadaran sosial dan agen perubahan dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, relasi kuasa tidak hanya membentuk pengalaman belajar, tetapi juga memengaruhi kepercayaan diri, motivasi, dan kesadaran diri peserta didik terhadap posisi sosial mereka.

Relasi kuasa dalam kelas pembelajaran merupakan aspek penting yang memengaruhi dinamika interaksi antara guru dan siswa serta proses pendidikan secara keseluruhan. Giroux (1988) menekankan bahwa kelas dapat menjadi ruang resistansi, tempat siswa tidak hanya tunduk pada kekuasaan, tetapi juga dapat melakukan negosiasi dan pembentukan makna secara aktif. Dalam konteks pembelajaran modern, Selwyn (2016) menunjukkan bahwa teknologi pendidikan dan ruang digital juga turut memengaruhi relasi kuasa, baik dengan memperkuat kontrol institusional maupun membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi siswa. Oleh karena itu, relasi kuasa dalam kelas pembelajaran perlu dipahami sebagai konstruksi sosial yang kompleks, yang mencerminkan ketegangan antara otoritas, resistansi, dan potensi transformasi dalam praktik pendidikan.

2.2 Kuasa dan Bahasa

Bahasa digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Pierre Bourdieu melihat bahasa tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi sebagai instrumen tindakan dan kekuasaan. Bourdieu (dalam Jenkins, 2004: 237-238) menyatakan bahwa praktik bahasa diposisikan secara langsung dalam interaksi sosial, dan seluruh kerangka teoritis tercakup dalam memahami wacana. Bahasa memiliki peran penting dalam mekanisme kekuasaan yang mendominasi terutama dalam menyembunyikan maksud sebenarnya dari suatu unsur aksi kekerasan. Contoh bahasa yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan adalah bahasa dalam politik.

Bahasa yang digunakan politik dan birokrasi elit untuk menyampaikan kepentingan kebijakan seperti kebijakan negara. Mereka menggunakan bahasa untuk meyakinkan masyarakat agar menerima kebijakan yang telah dibuat tanpa kritikan. Contoh lain dalam pemilihan umum, politisi menggunakan bahasa untuk

mengkampanyekan diri mereka sendiri. Setiap politisi biasanya menggunakan bahasa yang merepresentasikan dirinya sebagai kandidat terbaik dengan tujuan agar publik memilihnya dalam pemilihan umum. Berdasarkan contoh tersebut terlihat bahwa bahasa memiliki kekuasaan dalam hubungan sosial.

Bahasa sebagai instrumen kekuasaan juga dapat digunakan dalam media, baik media cetak, elektronik, maupun online. Media menggunakan bahasa untuk memengaruhi publik. Misalnya dalam berbisnis, melalui media, pengusaha menggunakan bahasa yang menarik dalam mempromosikan produk yang akan dipasarkan dengan tujuan memengaruhi masyarakat agar tertarik dengan apa yang dipasarkan. Contoh lain peraturan pemerintah Indonesia tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dalam peraturan presiden RI nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional pada semua jenjang pendidikan. Seluruh warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dalam pendidikan.

Bahasa sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan, politik, dan media, tetapi juga penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia. Penggunaan bahasa memiliki tingkatan atau struktur bahasa. Misalnya, bahasa Jawa memiliki tingkatan kepada siapa dan dari siapa dituturkan. Ada tingkatan narasi seperti ngoko lugu, ngoko andhap, antya basa, basa antya, wredha krama, mudha krama, kramantara, madya ngoko, madya krama, madyantara, krama inggil, dan krama desa. Misalnya bahasa ngoko digunakan untuk orang yang mempunyai status sosial rendah, bahasa krama digunakan untuk orang yang sederajat dan bahasa inggil digunakan untuk orang mempunyai status sosial tinggi atau digunakan untuk orang tua. Bahkan, ada tingkatan bahasa tersendiri bagi kalangan keraton Jawa yang disebut kedhaton dan bagogan (Santoso, 2013). Dalam kehidupan masyarakat Jawa, orang yang lebih tua, atau orang yang dihormati, kita harus menggunakan bahasa yang lebih tinggi jika berkomunikasi dengan mereka.

Mirip dengan bahasa Jepang yang memiliki aturan khusus untuk tingkatan atau struktur bahasanya. Tingkatan tuturan bahasa Jepang dapat dibagi menjadi tiga,

yang pertama adalah futsu atau bentuk biasa, yang kedua teinei sebagai bentuk sopan, yang ketiga adalah keigo sebagai bentuk tuturan hormat. Hampir sama dengan tuturan dalam bahasa Jawa, lebih khusus tingkatan keigo dalam tuturan bahasa Jepang dimaksudkan untuk memperhalus bahasa yang diucapkan oleh orang pertama (siapa yang berbicara atau siapa yang menulis), kemudian untuk menghormati orang kedua (siapa yang mendengarkan mendengarkan atau siapa yang membaca) (Santoso, 2013). Kedua contoh bahasa ini memiliki kesamaan mengenai fungsi tingkat tutur masing-masing bahasa, yaitu untuk menghormati orang yang lebih tua atau menghormati lawan bicara. Foucault berpendapat bahwa semakin bertingkat bahasa yang digunakan seseorang, semakin tinggi pula kekuasaan yang dimiliki.

Foucault juga mengemukakan bahwa kekuasaan (*power*) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai entitas represif yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu. Dalam *Discipline and Punish* (1975), ia menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki atau dipindahkan, melainkan hadir di setiap jaringan relasi sosial. Kuasa bersifat difus dan tersebar dalam berbagai praktik kehidupan sehari-hari, sehingga tidak selalu tampak dalam bentuk dominasi langsung (Foucault, 1977).

Salah satu aspek utama dari pemikiran Foucault adalah keterkaitan erat antara kekuasaan dan bahasa. Ia menolak pandangan klasik yang menganggap bahasa sebagai cerminan realitas objektif. Sebaliknya, melalui *The Archaeology of Knowledge* (1969), Foucault menyatakan bahwa bahasa (atau diskursus) tidak sekadar menggambarkan objek, tetapi turut menciptakan dan membentuk objek tersebut melalui struktur-struktur wacana tertentu (Foucault, 1972). Dengan demikian, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga mekanisme pembentuk realitas sosial dan epistemologis.

Foucault mengembangkan gagasan bahwa setiap bentuk pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan yang melahirkannya. Dalam *Power/Knowledge* (1980), ia menyatakan bahwa kekuasaan selalu beroperasi bersama dengan pengetahuan, dan bahwa produksi pengetahuan turut memperkuat

struktur kuasa yang ada. Hubungan ini ia sebut sebagai *power/knowledge* nexus, di mana kuasa dan pengetahuan saling membentuk dan memperkuat satu sama lain (Foucault, 1980).

Lebih lanjut, dalam *The History of Sexuality* (1976), Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja dengan cara membatasi atau melarang, melainkan juga menciptakan dan mengarahkan perilaku, identitas, serta pemahaman sosial terhadap subjek. Kuasa tidak bersifat represif saja, tetapi juga produktif; ia membentuk cara masyarakat memaknai "kebenaran", melalui mekanisme yang disebut Foucault sebagai *rejim kebenaran* (*regime of truth*) (Foucault, 1978). Bahasa, dalam konteks ini, menjadi medium utama yang mengatur apa yang bisa dikatakan, siapa yang boleh berbicara, dan bagaimana makna diproduksi serta dibatasi dalam suatu masyarakat.

Melalui pendekatan genealogis dan arkeologis, Foucault membongkar bagaimana praktik diskursif dalam bidang-bidang seperti medis, hukum, pendidikan, dan seksualitas membentuk cara berpikir dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran Foucaultian, tidak mungkin memisahkan kekuasaan dari bahasa; keduanya beroperasi secara simultan dan saling memperkuat dalam menciptakan tatanan sosial yang dominan.

Selain itu, Teun A. van Dijk (1998) juga menyoroti hubungan erat antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam praktik komunikasi. Menurut van Dijk, kekuasaan bukan hanya dimanifestasikan dalam tindakan fisik atau kebijakan institusional, melainkan juga melalui kontrol atas diskursus. Dalam pandangannya, kekuasaan diwujudkan ketika kelompok dominan dapat memengaruhi atau mengendalikan isi wacana publik dan proses pemaknaan yang berlangsung dalam masyarakat (van Dijk, 1993, 2001).

Van Dijk (1996) berpendapat bahwa bahasa memainkan peran sentral dalam reproduksi kekuasaan sosial, khususnya ketika aktor-aktor dominan seperti media, politisi, atau institusi pendidikan menggunakan representasi linguistik tertentu untuk mempertahankan hegemoni dan memperkuat ketimpangan sosial. Bahasa, dalam konteks ini, bukanlah sistem netral, tetapi merupakan sarana strategis yang

digunakan untuk menyusun narasi yang menguntungkan kelompok tertentu dan menyingkirkan alternatif pemaknaan yang lain.

Dalam kerangka teori van Dijk, kontrol atas diskursus melibatkan pengaruh terhadap tiga aspek utama: (1) akses terhadap wacana, yaitu siapa yang diberi atau dihalangi kesempatan untuk berbicara; (2) struktur wacana, yaitu bagaimana informasi disusun, apa yang ditekankan, dan apa yang diabaikan; serta (3) pemrosesan kognitif, yakni bagaimana audiens memahami, menafsirkan, dan menyerap pesan dalam wacana (van Dijk, 1993).

Lebih lanjut, van Dijk mengembangkan model yang menautkan antara struktur wacana dan struktur sosial, dengan menekankan bahwa produksi dan interpretasi wacana selalu melibatkan representasi mental yang dibentuk oleh ideologi. Dalam model ini, ia memperkenalkan konsep *mental models* dan *social cognition* sebagai jembatan antara penggunaan bahasa dan sistem keyakinan kolektif yang menjadi basis kekuasaan ideologis (van Dijk, 2006). Dengan demikian, dalam perspektif van Dijk, kuasa dijalankan melalui praktik diskursif yang tampak dalam penggunaan bahasa sehari-hari, teks media, pidato politik, maupun institusi-institusi formal. Bahasa tidak hanya mencerminkan struktur sosial yang ada, tetapi juga turut menciptakan, memperkuat, atau bahkan menggugat tatanan kuasa yang dominan. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur bahasa dalam wacana menjadi instrumen penting untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik praktik komunikasi.

Dalam pandangan Fairclough (1989, 1992) bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pembentukan dan pelestarian relasi kuasa. Fairclough (1992) menekankan bahwa wacana tidak netral, melainkan secara aktif terlibat dalam membentuk praktik sosial, termasuk praktik yang bersifat hegemonik. Menurut Fairclough, kekuasaan dalam wacana bekerja dalam dua bentuk utama yaitu kuasa dalam wacana (*power in discourse*) dan kuasa atas wacana (*power behind discourse*). Kuasa dalam wacana merujuk pada bagaimana relasi kuasa termanifestasi dalam interaksi linguistik secara langsung, misalnya dalam bentuk dominasi bicara, pemaksaan pendapat, atau kontrol atas

struktur naratif. Sementara itu, kuasa atas wacana berhubungan dengan bagaimana institusi atau kelompok sosial tertentu dapat mengatur siapa yang boleh berbicara, topik apa yang dapat dibicarakan, dan bagaimana cara penyampaian tertentu dilegitimasi (Fairclough, 1989).

Dalam kerangka teorinya, Fairclough mengembangkan pendekatan tiga dimensi terhadap analisis wacana, yaitu: 1) Teks yang mencakup analisis leksikal, sintaksis, gaya, dan struktur wacana. 2) Praktik diskursif yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks; 3) Praktik sosial yakni konteks sosial dan institusional lebih luas yang melingkupi teks dan praktik diskursif tersebut (Fairclough, 1995).

Fairclough (1989) menyoroti bahwa melalui analisis terhadap teks-teks linguistik, dapat diungkap relasi kuasa yang tidak kasat mata, termasuk dominasi ideologis yang berlangsung dalam masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap bahasa dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk menantang struktur sosial yang tidak adil. Dalam kerangka ini, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga merupakan instrumen aktif dalam membentuk dan mengubahnya.

Fairclough (2001) mengaitkan praktik diskursif dengan reproduksi dan transformasi tatanan sosial. Ia melihat bahasa sebagai bagian dari *praktik sosial* yang memiliki konsekuensi ideologis, dan karena itu penting untuk dianalisis secara kritis, terutama dalam konteks perubahan sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, pendekatan Fairclough memberi landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan struktur kuasa, mempertahankan hegemoni, atau mendorong resistensi.

Dalam perkembangan terbaru, Wodak (2015) memperkenalkan *Discourse-Historical Approach* (DHA), yang menggabungkan analisis linguistik dengan konteks historis dan intertekstual untuk mengungkap bagaimana ideologi dan kekuasaan disebarkan dalam berbagai konteks wacana, seperti politik, media, dan kebijakan. Para peneliti kontemporer juga menekankan pentingnya memperluas

analisis wacana kritis ke ranah digital seperti media sosial dan platform daring untuk memahami dinamika kuasa dalam ruang virtual (KhosraviNik, 2017). Dengan demikian, pendekatan yang mutakhir tidak hanya menelaah bentuk bahasa, tetapi juga secara kritis mengkaji bagaimana wacana beroperasi dalam membentuk ketimpangan sosial dan struktur dominasi dalam masyarakat global yang semakin kompleks.

2.3 Analisis Wacana Kritis

2.3.1 Definisi Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis merupakan pendekatan multidisipliner yang menekankan pada keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Van Dijk (1993) menyatakan bahwa analisis wacana kritis berfokus pada isu-isu dominasi, ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial sebagaimana tercermin dalam wacana yang digunakan dalam berbagai konteks sosial. Ia menegaskan bahwa analisis wacana kritis bertujuan mendeteksi ketimpangan dan mengungkap perlawanan terhadap kekuasaan dalam berbagai latar sosial, termasuk hukum dan politik, melalui pendekatan yang eksplisit dan berpihak pada keadilan sosial (van Dijk, 2001, p. 325). Lebih lanjut, van Dijk (2000) menekankan bahwa relasi antara wacana dan struktur sosial yang lebih luas menjadi elemen penting dalam analisis wacana kritis. Hal ini mencakup dimensi seperti hegemoni, kelas sosial, diskriminasi, ras, dan gender (van Dijk, 2000, pp. 353–354).

van Dijk (1995b) menggarisbawahi bahwa tujuan utama analisis wacana kritis adalah untuk mengungkap struktur tersembunyi dari kontrol sosial dan strategi-strategi kebahasaan yang digunakan oleh kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka (p. 18). Ia juga menunjukkan bahwa kelompok subordinat sering kali menggunakan mekanisme wacana untuk melegitimasi, menyamarkan, atau bahkan mendukung dominasi yang mereka alami. Oleh karena itu, dalam perspektif analisis wacana kritis, analisis tidak hanya tertuju pada wacana itu sendiri, tetapi juga melibatkan konteks sosial, politik, hukum, dan historis di

mana wacana tersebut berada, serta tanggung jawab sosial analisis wacana (van Dijk, 2001).

Fairclough (1989) menegaskan bahwa analisis berupaya mengeksplorasi strategi wacana yang melegitimasi dominasi dan menolak ketidaksetaraan sosial. Menurutnya, analisis wacana kritis bertujuan mengungkap hubungan tersembunyi antara praktik wacana, peristiwa, teks, dan struktur serta proses sosial yang lebih luas (Fairclough, 1995, pp. 132–133). Fairclough (1992) juga menyatakan bahwa analisis wacana kritis penting dalam membongkar penipuan dan manipulasi ideologis yang tersembunyi dalam teks yang tidak disadari oleh publik, sekaligus membekali khalayak dengan alat berpikir kritis.

Senada dengan itu, Wodak dan Meyer (2001) menyatakan bahwa fokus utama analisis wacana kritis adalah menyelidiki ketimpangan sosial yang tercipta dari penggunaan bahasa (p. 2), dan bahwa pendekatan ini berperan dalam mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dalam ideologi da(n) memungkinkan masyarakat untuk menyadari bagaimana mereka dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa (Wodak & Meyer, 2001, p. 10). Eagleton (1994) bahkan menekankan bahwa analisis wacana kritis bertujuan untuk menghilangkan misteri wacana dengan menguraikan ideologi (p. 15). Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga normatif dan intervensif.

2.3.2 Prinsip Analisis Wacana Kritis

Prinsip dasar analisis wacana kritis berangkat dari pandangan bahwa bahasa tidak bersifat netral, melainkan penuh dengan muatan ideologis yang mencerminkan dan mereproduksi relasi kuasa dalam masyarakat. Fairclough (2013) menegaskan bahwa bahasa digunakan bukan hanya sebagai alat komunikasi semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk, mempertahankan, atau bahkan menantang struktur kekuasaan. Menurut Fairclough dan Wodak (1997), terdapat delapan prinsip utama dalam analisis wacana kritis yang menjadi fondasi metodologis dan konseptual, yakni: pertama, analisis wacana kritis selalu membahas masalah sosial yang aktual dan relevan; kedua, relasi kekuasaan

dipahami sebagai fenomena yang terefleksikan dan direproduksi secara diskursif; ketiga, wacana tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat dan budaya tempatnya berkembang; keempat, wacana bersifat ideologis, mengandung nilai dan keyakinan tertentu yang berpengaruh terhadap pemaknaan; kelima, wacana bersifat historis, berkembang dan berubah seiring waktu serta peristiwa sosial; keenam, terdapat proses mediasi antara teks dan konteks sosial yang melatarbelakangi wacana tersebut; ketujuh, analisis wacana bersifat interpretatif dan eksplanatif, mengupayakan pemahaman mendalam terhadap makna yang tersirat; dan kedelapan, wacana merupakan bentuk aksi sosial yang memiliki dampak nyata dalam interaksi sosial dan struktur masyarakat (pp. 271–280).

Dalam ranah teori kognisi sosial, van Dijk (1995a) mengemukakan bahwa ideologi berperan sebagai struktur dasar yang mengorganisasi representasi mental individu dalam konteks sosial, yang diwujudkan melalui bahasa dan wacana (p. 21). Ideologi dalam perspektif ini berfungsi sebagai kerangka kognitif yang mengarahkan pembentukan opini, sikap, serta representasi sosial, sehingga berkontribusi dalam proses reproduksi atau perubahan relasi kuasa (van Dijk, 2008, p. 34). Pandangan ini diperkuat oleh Wodak (2007) yang menegaskan bahwa ideologi bukan hanya kumpulan nilai dan keyakinan, melainkan juga alat strategis yang digunakan untuk membangun dan mempertahankan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat (p. 209). Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak hanya menelaah teks secara dangkal, melainkan menelusuri bagaimana ideologi secara sistematis disusun dan dioperasionalkan melalui praktik linguistik yang nyata.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital menuntut perluasan cakupan analisis wacana kritis, yang kini turut memasukkan dimensi multimodal, seperti aspek visual, audio, dan algoritma digital, yang semakin kompleks dalam membentuk makna di ruang virtual (KhosraviNik, 2022). Lebih jauh lagi, Rogers (2011) dan Blommaert (2005) menekankan bahwa analisis wacana kritis modern tidak hanya berorientasi pada kajian akademik semata, tetapi juga bertujuan untuk mendukung transformasi sosial dengan mendorong

keterlibatan kritis dan aksi perubahan melalui pemahaman dan pengungkapan mekanisme kekuasaan yang tersembunyi dalam praktik komunikasi sehari-hari.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dan perkembangan analisis wacana kritis ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana bahasa dan wacana berperan sebagai arena perjuangan sosial, di mana ideologi dan kekuasaan terus-menerus diproduksi, dipertahankan, dan direbut kembali

2.3.3 Teori Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis merupakan pendekatan interdisipliner yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana wacana, baik tertulis maupun lisan berfungsi dalam membentuk, mereproduksi, dan mengubah relasi kekuasaan dalam masyarakat. termasuk dalam konteks interaksi kelas antara dosen dan mahasiswa. Teun A. van Dijk merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan analisis wacana kritis yang menghubungkan aspek linguistik, kognitif, dan sosial secara komprehensif. Dalam konteks ini, teori van Dijk tentang struktur mikro dan makro wacana, kognisi sosial, dan konteks sosial sangat relevan untuk memahami negosiasi kekuasaan dalam interaksi kelas.

Van Dijk (1992) mengemukakan bahwa dalam menganalisis wacana, penting untuk memahami struktur mikro dan struktur makro wacana. Struktur mikro merujuk pada unsur-unsur kecil dalam teks atau wacana, seperti kata, kalimat, dan paragraf, serta bagaimana unsur-unsur ini saling terkait untuk membentuk makna. Dalam interaksi kelas, struktur mikro wacana berupa unsur linguistik seperti pilihan klausa, pola kalimat, dan strategi retorika yang digunakan oleh dosen maupun mahasiswa sangat menentukan bagaimana posisi dan peran kekuasaan dibangun secara komunikatif. Misalnya, penggunaan imperatif oleh dosen atau ekspresi penolakan oleh mahasiswa bisa menjadi indikator adanya negosiasi kekuasaan. tindak tutur mikro merupakan struktur tindak tutur individu dan struktur linear rangkaian tindak tutur.

Struktur makro adalah makna global atau tema utama yang dibangun oleh keseluruhan teks atau wacana. Struktur makro melibatkan bagaimana ide-ide atau

pesan besar disusun melalui pengorganisasian berbagai bagian wacana sehingga menciptakan suatu representasi sosial yang lebih luas, misalnya bagaimana wacana kelas menegaskan posisi otoritas dosen sebagai figur penguasa ilmu dan mahasiswa sebagai penerima ilmu. Melalui analisis struktur mikro dan makro, dapat dilihat bagaimana wacana tersebut mereproduksi atau menegosiasikan ulang hirarki sosial dan kekuasaan dalam konteks pembelajaran.

Van Dijk (2012) menegaskan bahwa proses negosiasi kekuasaan dalam wacana tidak hanya terjadi secara eksplisit melalui bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh skema kognitif para pelaku interaksi. Dalam konteks kelas, dosen dan mahasiswa membawa kerangka kognitif berupa pengetahuan, nilai, sikap, serta pengalaman sosial mereka yang memengaruhi cara mereka memproduksi dan menafsirkan tuturan.

Kognisi sosial ini penting dalam memahami bagaimana kedua pihak membangun representasi diri dan lawan bicara, serta bagaimana prasangka, atau posisi sosial mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam interaksi. Misalnya, mahasiswa dapat menggunakan strategi linguistik tertentu untuk mengurangi jarak kekuasaan, sementara dosen mungkin menggunakan wacana yang memperkuat otoritasnya.

Menurut van Dijk (2012, hal. 114-115), representasi sosial melalui kognisi sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pengetahuan (knowledge), sikap (attitudes), dan ideologi (ideologies). Pertama, pengetahuan membahas tentang kepercayaan factual yang dibagikan oleh kelompok atau budaya tertentu. Wacana yang muncul berasal dari pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pribadi maupun pengalaman kelompok. van Dijk mengemukakan tiga metode dalam menganalisis perwujudan pengetahuan dalam wacana, yaitu ekspresi eksplisit pengetahuan (the explicit expression of knowledge), proposisi yang secara langsung mengacu pada pengetahuan penulis yang disampaikan secara eksplisit; pengetahuan implisit (implicit knowledge), yaitu proposisi yang mengisyaratkan pengetahuan khusus tanpa dinyatakan secara eksplisit; dan pengetahuan

kontekstual (contextual knowledge), yakni proposisi yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa sudah diketahui oleh pembaca dalam konteks sosial budaya tertentu.

Kedua, sikap membahas pendapat atau kepercayaan evaluatif penulis terhadap suatu objek atau peristiwa. Sikap ini dapat dianalisis melalui skematik teks atau alur cerita, di mana biasanya sikap penulis muncul pada bagian akhir skematik narasi. Menurut van Dijk (1998, hal. 99), terdapat beberapa strategi dalam menganalisis sikap dalam skema narasi, yaitu melacak seleksi yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, dan informasi diseleksi oleh penulis untuk ditampilkan dalam teks; melacak reproduksi yang menelusuri bagaimana informasi tersebut dikopi, digandakan, atau bahkan dihilangkan dalam wacana; serta melacak penyimpulan sebagai strategi peringkasan informasi atau pemetaan yang dapat mengungkapkan peta mental atau kognisi penulis terhadap suatu isu. Dalam penelitian ini, ketiga strategi tersebut akan digunakan untuk melihat kognisi penulis secara mendalam.

Selain pengetahuan dan sikap, elemen penting lainnya dalam representasi sosial melalui kognisi sosial menurut Van Dijk adalah ideologi. Ideologi merujuk pada sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang mendasari cara pandang kelompok atau individu terhadap dunia sosial. Ideologi berfungsi sebagai kerangka kognitif yang mempengaruhi bagaimana pengetahuan dan sikap dibentuk dan direpresentasikan dalam wacana. Dalam konteks produksi teks, ideologi terlihat dari bagaimana informasi dipilih, disusun, dan diinterpretasikan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Van Dijk menekankan bahwa ideologi bukan hanya kumpulan pandangan abstrak, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui struktur kognitif dan strategi linguistik yang dipakai penulis dalam wacana. Dengan demikian, analisis ideologi dalam wacana bertujuan untuk mengungkap bagaimana dominasi dan kekuasaan dapat direproduksi dan dipertahankan melalui cara representasi sosial dalam teks. Penelitian ini akan mengkaji peran ideologi dalam membentuk kognisi penulis, terutama dalam bagaimana ideologi tersebut mempengaruhi seleksi, reproduksi, dan penyimpulan informasi dalam wacana yang dianalisis.

Selain itu, van Dijk (2002) juga menegaskan pentingnya konteks sosial dalam analisis wacana kritis. Konteks sosial mencakup berbagai faktor eksternal yang memengaruhi produksi dan interpretasi wacana, seperti posisi sosial pembicara, hubungan kekuasaan, situasi sosial, serta norma dan nilai budaya yang berlaku.

Dalam teori van Dijk, konteks sosial tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi secara aktif membentuk struktur dan isi wacana. Konteks ini juga menjelaskan bagaimana wacana digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau menantang struktur sosial dan ideologi yang ada. Oleh karena itu, analisis wacana kritis harus mempertimbangkan interaksi antara teks, kognisi, dan konteks sosial agar dapat mengungkap makna tersembunyi dan fungsi sosial wacana secara menyeluruh.

Teun A. van Dijk (2002, hal. 116) menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam mengkaji wacana. Dalam analisis sosial van Dijk menyoroti tiga elemen utama yang harus dianalisis diantaranya :

1) Situasi Sosial

Situasi sosial mencakup latar belakang atau konteks tempat wacana itu berlangsung seperti lingkungan sekolah, kampus atau kelas, norma atau aturan yang berlaku dalam proses pembelajaran, hubungan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa, tujuan pembelajaran yang sedang dibahas. Van Dijk menganggap bahwa memahami situasi sosial penting karena wacana tidak bisa terlepas dari konteks tempat dimana wacana berlangsung. Misalnya, perbedaan antara interaksi kelas di sekolah dasar dan perguruan tinggi tentunya memiliki situasi sosial yang berbeda, dan ini memengaruhi bentuk serta fungsi wacana yang muncul.

2) Tindakan

Tindakan mengarah pada apa yang dilakukan oleh para pelaku dalam wacana seperti memberi intruksi, memberikan pertanyaan, memberikan penilaian umpan balik, dan membangun atau mempertahankan otoritas. Wacana dipahami sebagai bagian dari tindakan sosial. Artinya, berbicara, bertanya, atau bahkan diam dalam suatu interaksi kelas adalah bentuk tindakan sosial yang memiliki konsekuensi

tertentu, misalnya memperkuat posisi dosen sebagai pemegang otoritas atau memberi ruang partisipasi bagi mahasiswa.

3) Pelaku

Pelaku adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam produksi dan penerimaan wacana. Misalkan dalam konteks interaksi kelas pelaku seperti dosen, mahasiswa, dan kadang ada pihak ketiga yaitu kepala sekolah atau kurikulum yang memengaruhi isi atau bentuk interaksi. van Dijk menyatakan bahwa identitas sosial pelaku (misalnya usia, gender, status sosial, latar belakang etnis, peran institusional) memengaruhi bagaimana wacana diproduksi dan diinterpretasikan. Misalnya, ucapan dosen biasanya memiliki bobot lebih besar dibandingkan ucapan mahasiswa karena posisi kekuasaan yang dimiliki.

2.4 Negosiasi kekuasaan

2.4.1 Konsep Dasar Negosiasi kekuasaan

Negosiasi kekuasaan merujuk pada proses dinamis di mana individu atau kelompok dalam suatu struktur sosial atau institusional berupaya mempertahankan, memperluas, atau menegosiasikan posisi kekuasaan mereka melalui interaksi simbolik, bahasa, dan praktik sosial. Tidak seperti konsep kuasa yang bersifat absolut atau represif, negosiasi kekuasaan mengandaikan adanya ruang tawar-menawar, resistensi, dan adaptasi dalam praktik sosial sehari-hari.

Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang tidak statis, melainkan senantiasa diperjuangkan dan dinegosiasikan melalui berbagai saluran, termasuk wacana, representasi, norma, serta struktur sosial yang lebih luas. Kuasa tidak hanya dijalankan oleh pihak dominan, tetapi juga dapat ditantang, dibentuk ulang, dan dinegosiasikan oleh subjek yang berada dalam posisi subordinat.

Foucault (1978) melihat kuasa sebagai sesuatu yang tersebar dan produktif, bukan sekadar alat represif. Dalam kerangka ini, negosiasi kekuasaan terjadi dalam setiap hubungan sosial, karena kuasa selalu hadir dalam bentuk relasi, bukan sebagai sesuatu yang dimiliki secara tetap. Setiap subjek, termasuk mereka yang berada dalam posisi subordinat, memiliki kapasitas untuk menegosiasikan ulang

bentuk-bentuk kekuasaan melalui resistensi atau penggunaan wacana alternatif. Ia menyatakan bahwa “di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi” (Foucault, 1978: 95), yang membuka ruang bagi proses negosiasi kekuasaan secara terus-menerus.

van Dijk (1993, 2006) menjelaskan bahwa negosiasi kekuasaan dapat diamati dalam struktur wacana, terutama dalam interaksi antara kelompok dominan dan subordinat. Dalam kerangka analisis wacana kritis, kuasa dimaknai sebagai kemampuan untuk mengontrol praktik diskursif, baik dari sisi akses terhadap wacana maupun bentuk penyampaian pesan. Namun, ia juga menekankan bahwa audiens bukan penerima pasif, melainkan dapat menafsirkan ulang dan menegosiasikan makna dalam wacana tersebut, yang mencerminkan adanya proses negosiasi kekuasaan secara kognitif dan sosial (van Dijk, 2006).

Fairclough (1992, 2001) menekankan bahwa negosiasi kekuasaan berlangsung dalam praktik diskursif sehari-hari, termasuk dalam bahasa media, pendidikan, politik, dan institusi lainnya. Ia memandang wacana sebagai medan di mana ideologi dominan dikukuhkan, namun juga bisa digugat. Melalui konsep kuasa dalam wacana dan kuasa atas wacana, Fairclough menguraikan bagaimana kuasa dinegosiasikan dalam situasi konkret, baik secara linguistik (melalui struktur kalimat, pilihan kata) maupun secara sosial (melalui siapa yang memiliki otoritas berbicara dan menentukan agenda).

Scott (1990), melalui konsep *hidden transcripts*, memperlihatkan bagaimana kelompok subordinat sering kali menyampaikan bentuk perlawanan mereka secara terselubung, sembari tetap tampil tunduk dalam ruang publik. Ini merupakan bentuk negosiasi kekuasaan di mana subjek yang ditindas menggunakan strategi simbolik, sindiran, atau narasi alternatif untuk mempertanyakan dan merongrong otoritas yang dominan, tanpa konfrontasi langsung. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi kekuasaan juga berlangsung melalui praktik simbolik yang tersembunyi.

Bourdieu (1991) memandang bahwa kuasa sangat erat kaitannya dengan *capital* simbolik, termasuk kuasa linguistik. Dalam interaksi sosial, negosiasi kekuasaan terjadi ketika aktor sosial memanfaatkan modal simbolik dan posisi habitusnya untuk mempertahankan atau meningkatkan otoritasnya dalam suatu

ruang sosial. Bahasa, dalam hal ini, bukan hanya alat komunikasi, melainkan sumber kekuasaan yang dapat dinegosiasikan dalam berbagai arena, seperti pendidikan, media, dan politik.

Konsep dasar negosiasi dalam teori kontemporer merupakan interaksi sosial yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan pertukaran makna, kekuasaan, dan kepentingan dalam berbagai konteks. Salah satu pendekatan mutakhir datang dari Fisher, Ury, & Patton (2011) yang melalui pendekatan principled negotiation menekankan pentingnya memisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan bukan posisi, menghasilkan opsi bersama, dan menggunakan kriteria objektif sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks komunikasi antarbudaya dan organisasi, teori negosiasi identitas oleh Ting-Toomey (2005) menjelaskan bahwa negosiasi juga mencakup upaya mempertahankan citra diri dan identitas sosial dalam interaksi yang rentan terhadap konflik dan ketegangan.

Sementara itu, teori discursive negotiation (Putnam & Fairhurst, 2001) memandang negosiasi sebagai praktik diskursif, di mana para aktor menggunakan bahasa secara strategis untuk mengkonstruksi realitas sosial, menegosiasikan makna, dan merundingkan struktur kekuasaan. Dalam perkembangan yang lebih baru, Lewicki, Barry, & Saunders (2021) menekankan pentingnya negotiation ethics, teknologi, dan konteks virtual dalam memengaruhi proses negosiasi di era digital. Oleh karena itu, teori negosiasi modern tidak hanya mencakup aspek rasional dan strategis, tetapi juga dimensi kultural, identitas, bahasa, dan teknologi sebagai bagian integral dalam proses interaksi dan pengambilan keputusan.

2.4.2 Negosiasi kekuasaan Dalam Kelas

Kelas sebagai ruang interaksi pendidikan bukanlah ruang netral, melainkan merupakan arena sosial tempat kuasa diproduksi, dipertahankan, dan dinegosiasikan. Dalam konteks ini, negosiasi kekuasaan dalam kelas merujuk pada proses di mana dosen dan mahasiswa secara aktif terlibat dalam membentuk dan menata ulang relasi otoritas, kontrol, dan partisipasi melalui praktik pedagogis dan komunikasi sehari-hari. Kuasa dalam ruang kelas tidak semata dijalankan secara

vertikal oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi dapat bersifat timbal balik dan dinegosiasikan melalui diskusi, resistensi simbolik, maupun penggunaan bahasa.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Foucault memandang bahwa kuasa tidak bersifat represif atau dimiliki secara absolut, melainkan beroperasi melalui relasi sosial dan sistem pengetahuan (Foucault, 1978). Dalam konteks kelas, hal ini berarti dosen bukan satu-satunya subjek yang memiliki kuasa; mahasiswa pun memiliki kapasitas untuk melakukan resistensi terhadap aturan, norma, maupun gaya pengajaran yang otoriter. Praktik seperti diam, mempertanyakan materi, atau menyimpang dari struktur diskusi formal dapat dilihat sebagai bentuk negosiasi kekuasaan dalam level mikro, yang merefleksikan bagaimana kekuasaan selalu berada dalam proses perundingan yang terbuka.

Fairclough (1992, 2001) menekankan bahwa bahasa memiliki fungsi ideologis dan menjadi instrumen kuasa dalam proses pendidikan. Dosen yang mendominasi ruang bicara, menentukan topik diskusi, atau memutuskan siapa yang boleh berbicara, sedang menjalankan “kuasa atas wacana”. Namun, mahasiswa juga dapat menegosiasikan posisi mereka melalui pertanyaan kritis, penggunaan bahasa informal, atau bahkan bahasa tubuh yang menantang otoritas dosen. Dalam pendekatan ini, diskursus dalam kelas menjadi medan interaktif tempat posisi kuasa tidak bersifat tetap, melainkan selalu terbuka untuk ditantang atau dinegosiasikan.

Menurut van Dijk (1993, 2006), negosiasi kekuasaan dalam ruang kelas juga berkaitan dengan akses terhadap wacana dan kontrol atas isi serta bentuk interaksi verbal. Dosen yang mengatur struktur diskusi atau memberikan label terhadap perilaku mahasiswa sedang menjalankan kontrol diskursif. Namun, van Dijk juga menyatakan bahwa audiens (dalam hal ini mahasiswa) memiliki kapasitas untuk menginterpretasi, menolak, atau mengubah makna pesan melalui proses kognitif dan sosial. Oleh karena itu, kelas menjadi ruang di mana kuasa dan ideologi direproduksi, tetapi juga dapat dilawan melalui praktik diskursif mahasiswa.

Freire (1970) melalui pendekatan pedagogi kritisnya, secara eksplisit menolak model pendidikan, di mana dosen bertindak sebagai pemilik pengetahuan dan mahasiswa hanya sebagai penerima pasif. Ia menekankan pentingnya dialog antara

dosen dan mahasiswa sebagai bentuk negosiasi kekuasaan yang membebaskan, di mana keduanya belajar bersama melalui pertukaran gagasan yang setara. Dalam model ini, pengajaran bukan hanya proses transfer informasi, melainkan juga bentuk transformasi sosial yang memungkinkan redistribusi otoritas dalam kelas.

Negosiasi dalam ruang kelas merupakan proses interaktif yang mencerminkan hubungan kuasa, pertukaran makna, dan perundingan identitas antara guru dan siswa. Dalam pendekatan terkini, ruang kelas dipahami bukan hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, melainkan sebagai arena sosial di mana posisi, ideologi, dan hak suara dinegosiasikan secara terus-menerus (Holmes & O'Neill, 2021).

Fisher, Ury, dan Patton (2011) melalui prinsip *interest-based negotiation* menekankan pentingnya menemukan solusi bersama berbasis kepentingan, bukan posisi yang saling berlawanan—konsep ini kini banyak diterapkan dalam pendidikan partisipatif dan mediasi konflik di sekolah. Dalam konteks ruang kelas multikultural dan global, Ting-Toomey (2005) melalui teori *face-negotiation* menunjukkan bagaimana siswa dan guru saling menegosiasikan identitas sosial dan menjaga harga diri (*face*) dalam interaksi yang rentan terhadap kesalahpahaman budaya. Kohn (2020) menambahkan bahwa dalam model *student-centered learning*, negosiasi terjadi saat siswa diberikan ruang untuk menentukan tujuan belajar, memilih metode, dan terlibat dalam evaluasi, yang memperkuat demokratisasi pendidikan.

Di sisi lain, Dabrowski (2020) menyoroti pentingnya *voice-based pedagogy*, di mana suara siswa tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan pedagogis. Dalam konteks transformasi digital, Selwyn (2016) dan Walton et al. (2022) mencatat bahwa pembelajaran daring menghadirkan tantangan baru dalam negosiasi otoritas, interaktivitas, dan kehadiran sosial, terutama dalam kelas virtual yang semakin bergantung pada algoritma dan platform teknologi. Oleh karena itu, negosiasi menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan kesadaran kritis terhadap dinamika sosial dan budaya dalam menciptakan ruang kelas yang inklusif dan demokratis.

2.5 Teori Tindak Tutur

Menurut pandangan Superceanu (2007:76) tindak tutur bukan hanya ungkapan verbal atau struktur linguistik saja, melainkan merupakan tindakan dalam arti sebenarnya (actions by nature). John R. Searle (1969) mengembangkan teori tindak tutur dalam bukunya *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Menurutnya, komunikasi linguistik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini, tindak tutur (speech act) diartikan sebagai unit dasar komunikasi linguistik yang memiliki dimensi tindakan.

Searle (1969) membagi jenis – jenis tindak tutur kedalam tiga ketegori yaitu:

1) Tindak tutur lokusi

Tindak tutur lokusi adalah tuturan yang berupa kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Kalimat ini disebut dengan the act of saying something. Tindak tutur lokusi tidak mempermasalahkan maksud dan fungsi pragmatis tuturan yang disampaikan penutur

2) Tindak tutur ilokusi

Tindak tutur ilokusi merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan maksud dan fungsi komunikasi tertentu, sering disebut sebagai the act of doing something. Menurut Searle (1969, hlm. 36), tindak tutur ilokusi diklasifikasikan ke dalam lima jenis berdasarkan fungsi komunikatifnya, yang menjadi dasar dalam penelitian ini:

- a. Asertif: Tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi, seperti menyatakan, menyarankan, mengeluh, dan mengklaim.
- b. Direktif: Tuturan yang bertujuan mempengaruhi lawan bicara untuk melakukan suatu tindakan, misalnya memerintah, memohon, dan menasehati.
- c. Ekspresif: Tuturan yang mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, seperti berterima kasih, meminta maaf, atau memberi selamat.
- d. Komisif: Tuturan yang menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji dan bersumpah.

- e. Deklarasi: Tuturan yang menghubungkan isi ucapan dengan kenyataan yang dihadapi, seperti memecat, membaptis, atau menghukum.
- 3) tindak tutur perlokusi adalah tindakan yang bertujuan menimbulkan efek atau pengaruh pada pendengar, dikenal sebagai *the act to affect someone*.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji isu kekuasaan dalam pendidikan, khususnya dalam konteks interaksi kelas antara guru dan siswa atau antara pelajar dan struktur akademik. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus, pendekatan, dan kerangka analisis yang berbeda dengan penelitian ini. Berikut ini adalah ulasan terhadap beberapa penelitian yang relevan.

Wong (2016) dalam penelitiannya mengkaji hubungan kekuasaan antara guru dan siswa sebagai refleksi dari interaksi yang bertingkat dan saling terkait dalam konteks pendidikan Tiongkok. Wong mengidentifikasi enam faktor yang memengaruhi relasi kekuasaan tersebut, yakni: (1) budaya tradisional Tiongkok yang sangat menghormati guru dan otoritas, (2) pengajaran yang berorientasi pada ujian, (3) budaya keagamaan yang memperkuat ketimpangan kekuasaan, (4) reformasi kurikulum, (5) pendidikan nilai-nilai, dan (6) budaya sekolah tertentu yang justru menciptakan relasi kekuasaan yang lebih seimbang antara guru dan siswa.

Namun demikian, penelitian Wong (2016) tidak menyoroti bagaimana siswa merespons atau melawan ketimpangan kekuasaan tersebut. Fokus utamanya adalah pada faktor-faktor pembentuk relasi kuasa, bukan pada dinamika resistensi atau negosiasi kekuasaan dalam praktik interaksi sehari-hari di ruang kelas. Dalam konteks ini, penelitian ini mengambil pendekatan berbeda, dengan menyoroti bagaimana mahasiswa secara aktif menegosiasikan dan bahkan melawan kekuasaan melalui penggunaan bahasa dalam interaksi verbal dengan dosen.

Penelitian yang dilakukan oleh Sung (2019) di Hong Kong menelaah pengalaman dua mahasiswa internasional dengan latar belakang linguistik berbeda dalam menegosiasikan identitas mereka selama studi transnasional. Temuan

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi bahasa yang berbeda berdampak pada partisipasi sosial dan akademik mereka, serta konstruksi identitas diri mereka dalam konteks universitas. Sung menyoroti bagaimana bahasa menjadi sarana utama dalam proses negosiasi identitas.

Meskipun demikian, fokus penelitian Sung adalah pada proses identifikasi diri dan peran bahasa dalam konteks sosial-budaya mahasiswa, bukan pada dinamika kekuasaan antara pengajar dan pelajar. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada interaksi verbal antara dosen dan mahasiswa, dengan menempatkan bahasa sebagai sarana utama dalam negosiasi kekuasaan di ruang kelas.

Chiang (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *How Do Underachieving Working-Class Students Survive in the Classroom? Critiques on the Perspective of Resistance*, mengkaji bagaimana mahasiswa dari kelas pekerja mempertahankan identitas kolektif mereka melalui strategi perlawanan yang tidak secara langsung menentang otoritas guru. Strategi ini memungkinkan mereka untuk menghindari hukuman sekaligus mengurangi kebosanan dan tekanan akademik. Fokus utama dari perlawanan ini adalah penciptaan kesenangan sebagai sarana melawan tekanan struktural, bukan semata-mata bentuk perlawanan politik atau ideologis terhadap kekuasaan guru.

Penelitian ini menunjukkan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap otoritas pengajar, namun lebih pada ekspresi non-verbal dan perilaku di ruang kelas. Sebaliknya, penelitian ini menekankan bentuk perlawanan mahasiswa dalam bentuk verbal—yakni bagaimana penggunaan bahasa dalam interaksi langsung dengan dosen dapat mencerminkan bentuk-bentuk resistensi yang lebih halus dan kontekstual.

Tian dan Dumlao (2020) meneliti bagaimana pelajar memosisikan diri, menunjukkan perlawanan, dan menegosiasikan kekuasaan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL). Melalui pendekatan *critical classroom discourse analysis*, penelitian ini menemukan bahwa siswa membentuk identitas mereka melalui pemilihan kode bahasa, perebutan kekuasaan dalam interaksi, dan posisi diskursif dalam kelas. Temuan ini menunjukkan bahwa

perlawanan tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat diekspresikan melalui pilihan linguistik sebagai bentuk resistensi pasif.

Namun, penelitian tersebut berfokus secara eksklusif pada pelajar dan tidak melibatkan dinamika kekuasaan dua arah antara pelajar dan pengajar. Penelitian ini mengambil posisi berbeda, dengan memusatkan perhatian pada kedua belah pihak—baik dosen maupun mahasiswa—dalam menegosiasikan kekuasaan secara bersama-sama melalui bahasa yang digunakan dalam interaksi kelas.

Oral (2013) menggunakan pendekatan teori kekuasaan Foucault untuk meneliti bagaimana kekuasaan dijalankan dan dilawan dalam konteks pembelajaran EFL. Ia menemukan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari guru, tetapi juga dinegosiasikan dalam interaksi sehari-hari yang dipengaruhi oleh norma-norma pendidikan yang lebih luas. Dalam situasi pembelajaran yang ketat, siswa menunjukkan perlawanan melalui bentuk komunikasi non-verbal, seperti ketidakpedulian terhadap otoritas dan ketidakpatuhan terhadap instruksi guru.

Penelitian Oral menekankan aspek non-verbal sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan, sementara penelitian ini fokus pada bahasa verbal sebagai medium utama dalam pembentukan, negosiasi, dan pergeseran relasi kuasa di dalam kelas.

Berdasarkan ulasan terhadap sejumlah penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti relasi kekuasaan dari satu sisi, baik dari sisi pengajar sebagai pemegang otoritas, maupun dari sisi pelajar yang melakukan resistensi. Beberapa penelitian juga menekankan aspek perilaku atau ekspresi non-verbal sebagai bentuk dominasi atau perlawanan. Di sisi lain, ada pula yang melihat peran bahasa, tetapi lebih difokuskan pada konstruksi identitas pembelajar.

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dan melengkapi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tiga kontribusi utama:

1. Pendekatan linguistik diskursif – Penelitian ini menggunakan data berupa tuturan verbal dari dosen dan mahasiswa sebagai objek analisis utama, yang belum banyak dijadikan fokus dalam kajian serupa.

2. *Negosiasi dua arah* – Fokus penelitian tidak hanya pada perlawanan mahasiswa, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan dinegosiasikan secara dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam interaksi kelas.
3. *Analisis tingkat kekuasaan* – Penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat kekuasaan antara dosen dan mahasiswa terwujud dalam praktik interaksi, serta bagaimana kekuasaan tersebut dapat bergeser tergantung pada konteks dan strategi linguistik yang digunakan oleh kedua belah pihak.

Dengan merujuk pada Van Dijk (1992), yang menyatakan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi juga alat untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana dinamika kekuasaan terjadi secara nyata dalam interaksi kelas melalui tuturan-tuturan yang diucapkan.